

Abstrak

Nama : Gina Ambarwati
Program Studi : Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian
Judu; : Analisis Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian: Studi Kasus Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-4449/KASN/12/2021 Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian

Perlunya penyelesaian sengketa kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mencari keadilan terhadap Keputusan TUN yang dianggap merugikan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur yang benar dan instansi yang memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian sehingga bisa mengkaji kasus terkait kedudukan rekomendasi KASN Nomor: B-4449/KASN/12/2021 dalam penyelesaian sengketa kepegawaian PNS di kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan jenis data berupa data sekunder dengan meneliti bahan pustaka, dan metode analisis deskriptif kualitatif untuk analisis data. Adapun mekanisme prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diawali dengan upaya administratif yang berupa keberatan dengan kewenangan ada pada atasan pejabat yang berwenang dan banding administratif dengan kewenangan ada pada BPASN. Kewenangan selanjutnya yaitu ada pada PTUN dan atau PTTUN, dan yang terakhir ada pada MA untuk proses Kasasi. Jika dilihat dari proses tersebut serta kewenangan KASN yaitu terkait kewenangannya untuk melakukan tindakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Bupati Timor tengah Utara adalah tidak tepat. KASN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan, memerintahkan pencabutan serta menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

Kata Kunci: kewenangan KASN, sengketa kepegawaian, peraturan

Abstract

<i>Name</i>	: Gina Ambarwati
<i>Study Program</i>	: bachelor's degree (S1) of Public Administration, Concentration of Human Resource Administration and Management
<i>Title</i>	: Analysis of Authorities and Procedures for Settlement of employment disputes (Case Study of the State Civil Apparatus Commission Number: B-4449/KASN/12/2021 in Resolving a Settlement of employment disputes)

The need for settlement of employment disputes against the State Civil Apparatus (ASN) in the context of seeking justice for TUN decisions that are considered detrimental. This research wants to find out what are the correct procedures and agencies that have authority in the process of resolving employment disputes so that they can examine cases related to the position of the KASN recommendation Number: B-4449/KASN/12/2021 in resolving civil servant employment disputes in North Central Timor district. The method used is the normative legal research method, with the type of data in the form of secondary data by examining library materials, and a qualitative descriptive analysis method for data analysis. The mechanism for personnel dispute resolution procedures begins with administrative efforts in the form of objections with authority at the superiors of the authorized officials and administrative appeals with authority at BPASN. The next authority is that of PTUN and or PTTUN, and the last one is on the Supreme Court for the cassation process. When viewed from this process and KASN's authority, namely related to its authority to carry out supervisory actions and evaluate the implementation of ASN policies and management, KASN's recommendations addressed to the District Head of North Central Timor are not right. KASN does not have the authority to cancel, order the revocation and issue a new State Administrative Decree.

Keyword: *KASN's authority, employment disputes, peraturan*